

Multiplier Effect Ekosistem Ekonomi Dam Haji: Urgen dan Esensi Prospektif Policy

Mahmudi Affan Rangkuti ¹

Pascasarjana UIKA Bogor, Jawa Barat, Indonesia

affan_rangkuti@kemenag.go.id

Submission	Accepted	Published
2 November 2023	28 Juni 2024	30 Juni 2024

Abstract

Ideally, the implementation of Dam Haji activities should adhere to proper principles and mechanisms to ensure the quality of Muslim worship with complete trust and sincerity. In reality, however, the distribution of sacrificial animals often misses the mark, lacking transparency and accountability in its execution. This is a significant concern, especially considering that Indonesian pilgrims form a large group, with waiting lists spanning decades. This issue causes anxiety for both pilgrims and the government, necessitating alternatives to ensure the accurate implementation of Dam Haji. This article is a qualitative library research study. The methodology used is a descriptive analytical study with a normative juridical approach. The research concludes that policy recommendations are crucial for the implementation of Dam Haji to enhance data transparency, issue clear regulations, foster bilateral coordination with Saudi Arabia, and provide intensive education to pilgrims. Furthermore, proper implementation of Dam Haji offers opportunities to optimize fund management and meat distribution, ensuring that benefits are felt by the poor and needy both within and outside the holy land of Mecca.

Keyword: *Haji Dam, Economy, Policy Recommendations*

Abstrak

Idealnya, aktivitas *Dam Haji* diimplementasikan sesuai dengan kaidah dan mekanisme yang benar untuk menjaga kualitas ibadah Muslim dengan penuh kepercayaan dan keikhlasan. Kenyataannya, seringkali distribusi hewan kurban tidak tepat sasaran, bahkan tidak memiliki alur pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Padahal, jamaah haji Indonesia begitu besar bahkan memiliki daftar antri puluhan tahun. Keresahan ini menjadi momok

¹ Corresponding Author

tersendiri, baik bagi jamaah maupun pemerintah, sehingga perlu adanya alternatif agar pelaksanaan dam haji tepat sasaran. Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan basis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pentingnya rekomendasi kebijakan terhadap pelaksanaan *Dam Haji* guna meningkatkan transparansi data, penerbitan regulasi yang jelas, koordinasi bilateral dengan Arab Saudi, serta edukasi intensif kepada jamaah haji. Selain itu, adanya pelaksanaan Dam Haji dengan baik juga memberikan peluang untuk mengoptimalkan pengelolaan dana dan distribusi daging, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan, baik di dalam maupun di luar tanah haram Makkah

Kata Kunci: *Dam Haji, Ekonomi, Rekomendasi Kebijakan*

Pendahuluan

Ibadah Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu, sebagai rangkaian ibadah yang dijalankan di Baitullah, masyair, serta lokasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dibangun atas prinsip syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, tujuannya adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang optimal bagi jamaah haji agar mereka dapat menjalankan ibadah sesuai dengan aturan syariat yang ditetapkan (Wulandari et al., 2023). Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah ini, meskipun memang menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan yang optimal.

Peningkatan Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) pada tahun 2022 menjadi sorotan utama dalam pemahaman akan kualitas pelayanan haji. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, IKJHI mencatatkan rekor tertinggi sebesar 90,45 poin, naik 4,54 poin dari tahun sebelumnya. Indeks ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kepuasan jamaah terhadap berbagai aspek layanan, di antaranya transportasi antarkota yang mencapai 91,93 poin, serta pelayanan katering non-Armuzna dan Armuzna dengan nilai masing-masing 91,72 dan 91,52 poin. Meskipun demikian, pelayanan tenda menunjukkan kepuasan terendah dengan skor 87,91 poin, sementara hotel dan pelayanan umum berada di antara angka 89,35 dan 89,73 poin (Renta et al., 2023). Perbaikan dalam hal ini merupakan refleksi dari komitmen Kementerian Agama dalam mengoptimalkan pengaturan dan pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya.

Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah terkait dengan pelaksanaan Dam Haji. Dam, yang dalam bahasa Arab berarti darah, merupakan bagian dari proses ritual haji yang melibatkan penyembelihan hewan ternak di Tanah Haram Makkah. Permasalahan muncul terutama pada Dam Nusuk, yang dikenakan pada jamaah yang menjalankan haji Tamattu atau Qiran (Harahap, 2017). Kendati tidak karena kesalahan, jamaah diwajibkan membayar Dam dengan menyembelih kambing atau menggantinya dengan puasa sepuluh hari jika tidak

mampu melakukannya di tempat. Situasi ini sering kali menimbulkan kerugian dan polemik, terutama terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah dan oknum, merugikan jemaah secara finansial dan spiritual.

Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Agama telah berupaya aktif dengan melakukan muzakarah perhajian dan menggandeng berbagai pihak terkait, termasuk tokoh agama, akademisi, praktisi, dan pegiat haji. Rekomendasi dari muzakarah ini mencakup perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan kejelasan regulasi dalam pembayaran Dam Haji, agar setiap proses berjalan sesuai dengan ketentuan fikih dan memberikan jaminan perlindungan yang maksimal bagi jemaah. Langkah-langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas layanan, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Panambang et al., 2024).

Idealnya, penyelenggaraan Dam Haji harus memenuhi standar yang tinggi dalam hal keamanan, transparansi, dan keadilan. Setiap jemaah haji harus merasa yakin bahwa pembayaran Dam dilakukan secara benar sesuai dengan aturan fikih, tanpa adanya praktik penyalahgunaan atau penipuan. Proses ini juga harus memberikan manfaat maksimal kepada fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan, sehingga berkontribusi positif dalam perekonomian lokal di Tanah Suci dan Indonesia (Faatin, 2019). Namun, kenyataannya, pelaksanaan Dam Haji masih sering menghadapi tantangan serius. Berbagai laporan dan opini menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan dan kekurangan dalam pengelolaan dana Dam, yang mengakibatkan kerugian finansial bagi jemaah haji.

Permasalahan ini mencakup kejelasan regulasi, penegakan hukum yang tegas, dan kebutuhan akan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dana serta distribusi daging Dam. Selain itu, perlu adanya penelitian mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi kebijakan yang ada, dan menemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan Dam Haji secara menyeluruh. Dengan demikian, penting untuk melakukan studi yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan Dam Haji. Studi ini tidak hanya akan memberikan wawasan mendalam terhadap isu-isu yang ada, tetapi juga akan memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan perbaikan kebijakan yang dapat mengoptimalkan manfaat Dam Haji bagi semua pihak yang terlibat.

Tinjauan Pustaka

Publikasi tentang ekonomi Islam dan Dam Haji bukan wacana terbaru, sudah ada para peneliti yang membahasnya dalam berbagai konteks dan pendekatan. Mahfudzi dalam karyanya yang berjudul; *“Peran Islam Terhadap Praktek Ekonomi Dalam Dam Haji,”* telah menarasikan dengan sangat konstruktif, bagaimana Dam Haji perlu dievaluasi karena sering terjadi kekaburan akuntabilitas oleh oknum pelaksananya. Tidak hanya itu, Mahhfudzi juga menjelaskan bahwa masalah Dam Haji ini akan terus terjadi pengulangan jika tidak ada sistem yang dapat menunjukkan trasparansi prosedur hingga denda diberikan kepada yang berhak (Mahfudzi, 2018). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian di atas dalam konteks Dam Haji dan masukkan kebijakkan di dalamnya. Perbedaannya,

jika Mahfudzi hanya fokus dengan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan, penulis lebih fokus dalam mengembangkan potensi Dam Haji bagi peningkatan sektor-sektor ekonomi Islam di Indonesia.

Hendri Tanjung dalam penelitian yang berjudul; *“Hikmah Ibadah Haji Terhadap Ekonomi,”* telah menyimpulkan dengan sangat baik terkait korelasi antara ibadah haji dan potensi ekonomi. Menurut Hendri, terdapat tiga aspek ekonomi utama: pra haji (persiapan harta yang halal dan kesempatan usaha kecil serta tenaga kerja musiman), saat haji (sedekah, badal haji, dam, dan asuransi haji), dan pasca haji (zakat, infaq, sedekah, manihah, serta investasi akhirat melalui zakat) (Tanjung, 2019). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks perpaduan antara variabel ekonomi dan ibadah haji. Perbedaannya, jika Hendri Tanjung mengupas panjang lebar tentang sisi ekonomi yang ada pada ibadah haji, penulis hanya fokus pada sisi Dam Haji semata. Selain itu, Hendri berorientasi pada objek formal berupa hikmah ibadah haji, adapun penulis lebih menekankan pada alternatif kebijakan yang direkomendasikan.

Haddad Ulum Harahap, pada tulisannya yang berjudul; *“Peran Penyelesaian Dam Terhadap Status Hukum Pelaksanaan Haji,”* telah mendeskripsikan dengan baik bagaimana signifikansi antara Dam Haji dengan status hukum pelaksanaan haji sehingga dapat menjadi rujukan Muslim tanah air. Tidak hanya itu, bahkan Haddad menawarkan pentingnya ijtihad terhadap penggabungan dua dam sehingga lebih efektif, efisien, dan maslahat bagi yang berekonomi menengah ke bawah (Harahap, 2017). Tulisan Haddad Ulum di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks dam haji dan saran konstruktif di dalamnya. Perbedaannya, jika Haddad Ulum *concern* terhadap dimensi hukum Islamnya, penulis lebih serius dalam mengeksplorasi sisi ekonomi Islamnya.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan pendekatan teologis, ekonomi, dan regulasi dalam melihat Dam Haji. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung terfokus pada salah satu aspek, kajian ini mengintegrasikan dampak sosial, ekonomi, dan kebutuhan regulasi secara holistik. Ini juga memperkenalkan analisis tentang pentingnya kebijakan intervensi negara dalam mengelola Dam Haji untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan ekonomi kedua negara terkait.

Metodologi Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan basis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber primer dalam tulisan ini adalah artikel ilmiah terakreditasi dengan terbitan lima tahun terakhir. Adapun sumber sekunder adalah literasi digital seperti berita online, website online, dan info sosial media. Metode analisis data dilakukan secara deduktif dan tematik, dimana fokus utama pada isu dam haji yang dielaborasi dengan wacana Hukum Ekonomi Syariah. Agar sumber referensi valid (real), tidak beradu dan tidak tumpang tindih, maka pengujian keabsahan data penulis lakukan dengan menerapkan triangulasi dan validasi data dimana variabel ‘dam haji’ dan ‘potensi ekonomi’ sebagai variabel acuan. Setelah hasil penelitian ditemukan, penulis juga mendeskripsikan tujuan

yang ingin dicapai penelitian ini. Hal tersebut termaktub dalam rekomendasi kebijakan dan alternatif solusi yang penulis gagas.

Isu Dam Haji

Penelitian mendalam tentang Dam Haji yang mencakup pemberitaan di media massa dan pengalaman langsung yang dialami penulis telah mengidentifikasi isu-isu utama terkait pembayaran, pelaksanaan, dan distribusi Dam Haji. Isu-isu ini dikelompokkan berdasarkan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penyelesaian. Identifikasi masalah Dam Haji memetakan persoalan yang terjadi serta upaya penyelesaiannya dengan keterlibatan negara, dalam hal ini Kementerian Agama. Selama ini, negara telah memantau dan memperhatikan perkembangan isu Dam Haji dengan memberikan himbauan.

Pendekatan yang berhati-hati ini diambil karena aktivitas Dam Haji tidak hanya bersifat ibadah tetapi juga mempengaruhi sektor ekonomi dua dan tiga. Pada tahun 2022, Kementerian Agama melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter agar segera melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada jemaah. Himbauan kepada jemaah untuk tidak bertransaksi dengan calo atau pedagang, serta tidak membeli kupon dari situs web yang mencurigakan, merupakan langkah preventif untuk menghindari penipuan (Syam & Basir, 2022).

Pemerintah Saudi melalui Perusahaan Motawif Jemaah Haji Asia Tenggara (Motowifs Pilgrims For South East Asian Countries Company) mengeluarkan surat petunjuk tentang Dam dan Kurban Tahun 1443H. Surat tersebut ditujukan kepada Perwakilan Misi Haji dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand, menginformasikan bahwa jemaah dapat membayar Dam melalui saluran pembayaran resmi yang ditentukan pemerintah Arab Saudi seperti Bank Pembangunan Islam (IsDB), Bank Al Rajhi, Pos Saudi, dan Situs ADAHI. Namun, dalam praktiknya, banyak jemaah lebih memilih Dam Haji melalui KBIHU dan oknum tertentu. Pilihan ini didasari oleh beberapa indikator, yaitu keanggotaan dalam KBIHU, kedekatan dengan tokoh KBIHU, dan personal oknum yang bermukim di Arab Saudi. Selain itu, harga yang ditawarkan oleh KBIHU dan oknum ini juga relatif lebih terjangkau.

Meskipun banyak jemaah tidak mempermasalahkan apakah Dam Haji dilaksanakan atau tidak, penting untuk diingat bahwa persoalan ini berkaitan dengan fikih dan perlindungan jemaah. Oleh karena itu, Kementerian Agama perlu melakukan intervensi dengan beberapa pertimbangan utama. *Pertama*, upaya untuk mencapai kemabruran haji menjadi alasan utama intervensi pemerintah. Kemabruran haji adalah tujuan utama setiap jemaah, dan pelaksanaan Dam yang sah merupakan bagian penting dari proses tersebut. *Kedua*, Dam Haji memiliki dampak langsung pada umat miskin ekstrem dan stunting baik di Arab Saudi maupun di luar Arab Saudi. Oleh karena itu, pelaksanaan Dam yang tepat dapat membantu mengurangi masalah sosial ekonomi yang signifikan. *Ketiga*, aktivitas Dam Haji sangat erat kaitannya dengan entitas ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian bangsa (Fahham, 2016). Dengan memastikan

pelaksanaan Dam yang sah dan terorganisir, Kementerian Agama dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi haji yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi berbagai isu terkait Dam Haji, negara melalui Kementerian Agama perlu memainkan peran yang lebih aktif dan intervensif. Hal ini penting untuk memastikan kemabruran haji, mengatasi dampak sosial ekonomi, dan mendukung ekosistem ekonomi haji. Dengan demikian, intervensi pemerintah tidak hanya akan membantu jemaah dalam melaksanakan ibadah haji dengan lebih baik tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Multiplier Effect Ekosistem Ekonomi dari Dam Haji

Ekosistem ekonomi yang terbentuk dari pelaksanaan Dam Haji memiliki multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Aktivitas Dam Haji, yang melibatkan penyembelihan hewan kurban seperti kambing dan domba, tidak hanya merupakan bagian integral dari ibadah haji tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas dan beragam bagi berbagai sektor di tanah air (Tuhfah Nabelah, 2021). *Pertama*, sektor peternakan kambing dan domba di Indonesia mendapatkan dorongan besar melalui permintaan tahunan yang tinggi untuk Dam Haji. Permintaan ini memotivasi peternak untuk meningkatkan produksi dan kualitas ternak mereka. Dengan adanya pasar yang stabil dan berkelanjutan dari pelaksanaan Dam Haji, peternak lokal memiliki insentif untuk melakukan investasi dalam infrastruktur peternakan, teknologi, dan pelatihan. Hal ini tidak hanya meningkatkan jumlah produksi tetapi juga memperbaiki kualitas daging yang dihasilkan. Selain itu, peningkatan produksi ternak juga mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor peternakan, mulai dari pekerja lapangan hingga tenaga ahli dalam bidang pengelolaan peternakan.

Kedua, multiplier effect juga terasa dalam sektor perdagangan dan jasa. Proses penyembelihan dan distribusi hewan kurban memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti pedagang hewan, rumah pemotongan hewan, transportasi, dan jasa distribusi. Setiap tahapan dalam rantai pasokan ini menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja tambahan. Misalnya, rumah pemotongan hewan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan selama musim haji, demikian pula perusahaan transportasi yang menangani pengiriman hewan kurban dari peternak ke lokasi penyembelihan (Amanuddin, 2022). *Ketiga*, sektor perbankan dan jasa keuangan juga merasakan dampak positif dari ekosistem ekonomi Dam Haji. Pembayaran untuk pembelian hewan kurban seringkali dilakukan melalui lembaga keuangan seperti bank dan platform pembayaran digital. Hal ini meningkatkan volume transaksi keuangan selama musim haji, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan bagi lembaga keuangan tersebut. Selain itu, adanya kebutuhan untuk memfasilitasi pembayaran internasional bagi ekspor ternak juga mendorong bank untuk menyediakan layanan yang lebih efisien dan terjangkau.

Keempat, sektor industri makanan dan minuman juga mendapat manfaat dari multiplier effect ini. Daging dari hewan kurban yang telah disembelih seringkali diolah menjadi berbagai produk makanan. Hal ini menciptakan peluang bagi industri pengolahan daging, restoran, dan sektor makanan olahan lainnya untuk mengembangkan produk-produk baru yang dapat dijual baik di pasar lokal

maupun internasional. Selain itu, konsumsi daging selama musim haji juga meningkat, yang berdampak positif pada pendapatan pedagang makanan dan restoran (Andni et al., 2023). *Kelima*, multiplier effect juga mencakup sektor sosial dan filantropi. Sebagian besar daging kurban didistribusikan kepada kaum miskin dan membutuhkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Distribusi ini membantu mengatasi masalah gizi dan ketahanan pangan di kalangan masyarakat kurang mampu. Selain itu, kegiatan filantropi yang terkait dengan pelaksanaan Dam Haji juga mendorong solidaritas sosial dan rasa kebersamaan di antara umat Muslim, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Tidak kalah penting, multiplier effect dari ekosistem ekonomi Dam Haji juga menyentuh sektor pendidikan dan penelitian. Adanya kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas ternak dan proses penyembelihan mendorong kerjasama antara peternak dengan lembaga pendidikan dan penelitian. Ini mencakup pengembangan teknologi baru dalam peternakan, praktik manajemen peternakan yang lebih baik, serta penelitian dalam bidang kesehatan hewan dan keamanan pangan. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk tetapi juga menambah pengetahuan dan keahlian di kalangan peternak dan akademisi (Mahfudzi, 2018).

Secara keseluruhan, multiplier effect dari ekosistem ekonomi Dam Haji memberikan dampak yang luas dan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dari sektor peternakan hingga jasa keuangan, perdagangan, industri makanan, dan sektor sosial, semua merasakan manfaat dari aktivitas Dam Haji yang terorganisir dengan baik. Intervensi pemerintah dalam memastikan pelaksanaan Dam Haji yang sah dan terstruktur tidak hanya mendukung pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Peluang Ekspor Dam Haji

Peluang ekspor Dam Haji menjadi salah satu aspek yang sangat menjanjikan dalam ekosistem ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor peternakan dan perdagangan. Dam Haji, yang merupakan salah satu kewajiban bagi jemaah haji, melibatkan penyembelihan hewan kurban seperti kambing dan domba. Permintaan tinggi untuk hewan kurban ini menciptakan peluang ekspor yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. *Pertama*, pasar internasional untuk hewan kurban dari Indonesia menunjukkan prospek yang cerah. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), dan beberapa negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah memiliki permintaan yang besar untuk kambing dan domba, terutama selama musim haji. Sejak tahun 2018, Indonesia telah memulai ekspor domba ekor tipis ke Malaysia dengan permintaan mencapai 5.000 ekor per bulan. Selain itu, ekspor domba Garut ke UEA dengan permintaan sebesar 3.600 ekor per tahun menunjukkan bahwa produk peternakan Indonesia memiliki daya tarik di pasar internasional (Safitri et al., 2023).

Pasar ekspor ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Permintaan tahunan yang stabil dan terus meningkat memberikan insentif bagi peternak lokal untuk meningkatkan produksi dan kualitas ternak mereka. Dengan adanya pasar

ekspor yang menjanjikan, peternak memiliki alasan kuat untuk melakukan investasi dalam teknologi peternakan, perbaikan fasilitas, dan pelatihan tenaga kerja. Ini tidak hanya meningkatkan jumlah produksi tetapi juga memperbaiki kualitas daging yang dihasilkan, yang sangat penting untuk memenuhi standar internasional.

Kedua, peluang ekspor Dam Haji juga membuka jalan bagi pengembangan industri pendukung yang kuat. Penyembelihan hewan kurban untuk Dam Haji memerlukan dukungan dari berbagai sektor seperti transportasi, pengemasan, dan penyimpanan daging. Ini menciptakan peluang bisnis baru dan lapangan kerja tambahan di berbagai bidang. Misalnya, perusahaan transportasi hewan akan berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan untuk pengiriman ternak ke negara-negara tujuan ekspor. Selain itu, perusahaan yang menyediakan layanan pengemasan dan penyimpanan daging juga akan melihat peningkatan permintaan (Maesya & Rusdiana, 2018).

Ketiga, peluang ekspor ini juga membawa dampak positif bagi sektor keuangan dan perbankan. Transaksi pembayaran untuk ekspor hewan kurban sering kali melibatkan lembaga keuangan seperti bank dan platform pembayaran digital. Peningkatan volume transaksi internasional ini meningkatkan pendapatan bagi lembaga keuangan dan mendorong mereka untuk menyediakan layanan yang lebih efisien dan terjangkau. Selain itu, adanya kebutuhan untuk memfasilitasi pembayaran internasional mendorong bank untuk berinovasi dalam layanan keuangan mereka, seperti pengembangan produk-produk keuangan yang khusus dirancang untuk mendukung ekspor hewan ternak.

Keempat, peluang ekspor Dam Haji juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan. Pendapatan dari ekspor hewan kurban dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak lokal dan masyarakat pedesaan. Peningkatan pendapatan ini dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendukung program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Nurchaliza, 2018). *Kelima*, peluang ekspor Dam Haji juga membuka jalan bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara tujuan ekspor. Dengan menjadi salah satu pemasok utama hewan kurban untuk negara-negara tersebut, Indonesia dapat meningkatkan posisinya dalam perdagangan internasional dan memperkuat hubungannya dengan mitra dagang strategis. Hubungan yang kuat ini dapat membawa manfaat jangka panjang dalam bentuk kerjasama ekonomi dan perdagangan yang lebih luas, termasuk di sektor-sektor lain selain peternakan.

Namun, untuk memaksimalkan peluang ekspor Dam Haji, Indonesia perlu mengatasi beberapa tantangan. Pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ternak harus didukung oleh investasi dalam teknologi peternakan dan pelatihan tenaga kerja. Kedua, infrastruktur pendukung seperti transportasi, pengemasan, dan penyimpanan harus ditingkatkan untuk memastikan hewan kurban sampai ke negara tujuan dalam kondisi baik. Ketiga, regulasi dan standar internasional harus dipenuhi untuk memastikan produk peternakan Indonesia dapat bersaing di pasar global.

Dalam kesimpulannya, peluang ekspor Dam Haji menawarkan potensi besar bagi perekonomian Indonesia. Dengan pasar internasional yang menjanjikan,

pengembangan industri pendukung yang kuat, serta manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan, Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, serta inovasi dalam teknologi dan layanan, akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ini dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam pasar ekspor hewan kurban di dunia.

Menurunkan Angka Miskin, Miskin Ekstrem dan Stunting

Dam Haji memiliki potensi besar dalam memberikan dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting di Indonesia. Sebagai bagian integral dari ibadah haji, Dam Haji melibatkan penyembelihan hewan kurban seperti kambing dan domba. Selain merupakan kewajiban religius, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan kesehatan yang masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Pertama, Dam Haji dapat berperan signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan. Penyembelihan hewan kurban dalam jumlah besar menciptakan permintaan yang tinggi untuk ternak kambing dan domba. Hal ini memberikan peluang ekonomi bagi peternak lokal untuk meningkatkan produksi mereka. Dengan adanya pasar yang stabil dan berkelanjutan setiap tahun, peternak memiliki insentif untuk berinvestasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak mereka (Salim, 2016). Peningkatan produksi ternak ini tidak hanya meningkatkan pendapatan peternak tetapi juga menciptakan lapangan kerja tambahan di sektor peternakan dan industri pendukungnya, seperti transportasi, pengemasan, dan distribusi daging.

Kedua, Dam Haji juga berpotensi mengurangi kemiskinan ekstrem, terutama di daerah-daerah pedesaan di mana peternakan merupakan salah satu sumber utama mata pencaharian. Peningkatan permintaan untuk hewan kurban mendorong peternak di daerah terpencil untuk meningkatkan produksi mereka. Pendapatan tambahan dari penjualan hewan kurban dapat digunakan oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, peningkatan pendapatan dari Dam Haji dapat membantu mengangkat keluarga-keluarga dari kemiskinan ekstrem dan memberikan mereka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Sholichah, 2020). Selain itu, distribusi daging kurban dari Dam Haji juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin. Daging kurban sering kali didistribusikan kepada keluarga-keluarga kurang mampu yang jarang memiliki akses ke protein hewani. Konsumsi daging yang lebih tinggi membantu meningkatkan status gizi mereka, yang sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan fisik anak-anak. Dengan demikian, distribusi daging kurban dari Dam Haji berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Ketiga, Dam Haji memiliki potensi untuk mengurangi angka stunting di Indonesia. Stunting, atau kondisi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurang gizi kronis, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Kekurangan asupan gizi, terutama protein hewani, merupakan salah satu penyebab utama

stunting. Distribusi daging kurban dari Dam Haji kepada keluarga-keluarga kurang mampu memberikan akses yang lebih baik ke sumber protein berkualitas tinggi. Konsumsi daging yang cukup dan berkelanjutan membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan demikian, Dam Haji dapat berkontribusi langsung pada upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia (Musorif, 2022).

Keempat, Dam Haji juga mendukung program-program sosial dan kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan stunting. Pendapatan dari penjualan hewan kurban dapat digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Misalnya, sebagian dari pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk program peningkatan kapasitas peternak, pembangunan infrastruktur peternakan, dan penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu, program distribusi daging kurban dapat dikombinasikan dengan program edukasi gizi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan bergizi (Andni et al., 2023).

Kelima, intervensi pemerintah dalam pelaksanaan Dam Haji sangat penting untuk memastikan bahwa dampak positif dari kegiatan ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam mengatur dan mengawasi proses penyembelihan dan distribusi daging kurban agar berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa daging kurban didistribusikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dampak positif dari Dam Haji dapat dimaksimalkan (Wardana & Suhartini, 2023).

Berdasarkan analisa di atas, Dam Haji menawarkan peluang besar untuk mengurangi angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting di Indonesia. Melalui peningkatan produksi dan distribusi daging kurban, Dam Haji tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi peternak lokal tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat miskin. Dengan intervensi yang tepat dari pemerintah dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, Dam Haji dapat menjadi salah satu alat yang efektif dalam mengatasi masalah sosial dan kesehatan yang masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Alternatif dan Solusi

Peluang intervensi Kementerian Agama dalam menjamin pelaksanaan Dam Haji memiliki dampak yang sangat signifikan. Intervensi ini tidak hanya menjamin perlindungan bagi jemaah dengan memastikan pelaksanaan Dam Haji sesuai dengan ketentuan fikih, tetapi juga membuka peluang untuk aktivitas ekspor, penurunan angka kemiskinan ekstrem, stunting, dan kerja sama dengan entitas ekonomi lainnya, termasuk pemerintah Arab Saudi, sebagai bagian dari multiplier effect ekosistem ekonomi Dam Haji (Panambang et al., 2024). Intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Agama harus melibatkan penerbitan kebijakan sebagai rule of law dan kepastian hukum. Hingga saat ini, Kementerian Agama belum menggunakan hak diskresinya sebagai regulator untuk menerbitkan

regulasi yang mengatur pelaksanaan Dam Haji sesuai dengan fikih, yang juga menjamin perlindungan sosial dan dampak positif bagi entitas ekonomi.

Data dari berbagai media massa menunjukkan perbedaan biaya kambing dan domba di Indonesia dan Arab Saudi dalam pelaksanaan ritus Dam Haji. Tabel komparatif ini menunjukkan bahwa intervensi Kementerian Agama dapat membantu dalam mengatur harga dan memastikan ketersediaan hewan kurban yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau bagi jemaah haji. Ini tidak hanya menguntungkan jemaah tetapi juga membuka peluang untuk peningkatan aktivitas ekspor hewan ternak dari Indonesia ke Arab Saudi. Potensi penggunaan hak diskresi oleh Kementerian Agama dalam penerbitan regulasi terkait Dam Haji dapat berdampak besar. Berdasarkan asumsi biaya Rp.3.100.000 per jemaah untuk Dam Haji dan jumlah jemaah yang mencapai 211.000 orang, potensi pemberdayaan ekonomi minimal mencapai Rp. 654.100.000.000 per tahun. Jumlah ini mencerminkan hubungan timbal balik ekonomi dan distribusi daging Dam Haji bagi umat Islam di Indonesia dalam konteks ekosistem ekonomi haji. Distribusi daging kurban ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan stunting, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan asupan protein hewani yang cukup.

Adapun identifikasi akad pembayaran, pemotongan, dan distribusi Dam Haji menunjukkan bahwa dengan regulasi yang tepat, proses ini dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Regulasi yang mengatur tentang pembayaran, pemotongan, dan distribusi Dam Haji akan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan fikih dan memberikan manfaat maksimal bagi jemaah dan masyarakat luas (Mahfudzi, 2018). Begitu juga dengan *Cost Benefit Analysis* dari pembayaran, pemotongan, dan distribusi Dam Haji menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Dengan regulasi yang tepat, biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Dam Haji dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi jemaah maupun bagi ekonomi nasional.

Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembayaran Dam atas Haji Tamattu dan Qiran secara kolektif semakin membuka peluang bagi Kementerian Agama untuk menggunakan hak diskresi dalam penerbitan regulasi. Dukungan dari publik terhadap fatwa ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan dan keinginan untuk regulasi yang lebih jelas dan tegas dalam pelaksanaan Dam Haji. Dengan intervensi yang tepat, Kementerian Agama dapat memastikan bahwa pelaksanaan Dam Haji tidak hanya memberikan manfaat spiritual bagi jemaah tetapi juga manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia (Yuliani, 2022). Penerbitan regulasi yang mengatur pelaksanaan Dam Haji dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan fikih dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, peluang intervensi Kementerian Agama dalam menjamin pelaksanaan Dam Haji memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan, akan sangat penting dalam mewujudkan potensi ini dan

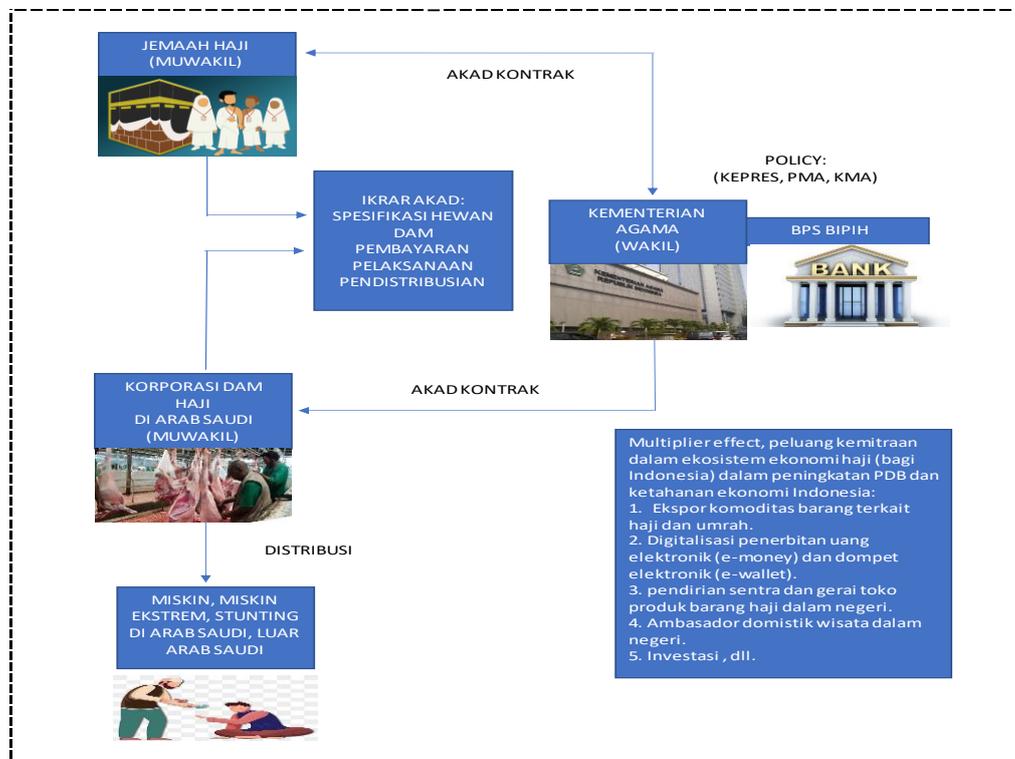
memastikan bahwa Dam Haji dapat memberikan manfaat yang optimal bagi umat Islam di Indonesia dan ekonomi nasional.

Maka dari itu, pelaksanaan Dam Haji memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya dari segi spiritual, tetapi juga dari segi ekonomi dan sosial. Peluang intervensi Kementerian Agama dalam menjamin pelaksanaan Dam Haji sangat signifikan, terutama dalam hal penyusunan regulasi yang sesuai dengan ketentuan fikih, memberikan perlindungan bagi jemaah, serta membuka berbagai peluang lain seperti peningkatan aktivitas ekspor, penurunan angka kemiskinan ekstrem, stunting, dan kerja sama dengan entitas ekonomi lainnya termasuk pemerintah Arab Saudi. Intervensi ini harus dilakukan melalui penerbitan kebijakan yang memberikan kepastian hukum. Hingga saat ini, Kementerian Agama belum sepenuhnya menggunakan hak diskresinya sebagai regulator untuk menerbitkan regulasi yang mengatur pelaksanaan Dam Haji sesuai dengan ketentuan fikih. Namun, dengan adanya dukungan dari publik dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, semakin terbuka peluang bagi Kementerian Agama untuk melakukan intervensi yang lebih proaktif (Hulwati et al., 2023).

Diktum pertama dari ketentuan hukum menyatakan bahwa pembayaran dana untuk Dam atas Haji 'Tamattu' atau Qiran secara kolektif boleh dilakukan dengan ketentuan menggunakan *akad wadi'ah* (titipan) saat pembayaran dan *akad wakalah* (perwakilan) saat pelaksanaan. Jemaah haji sebagai muwakkil memberikan mandat penuh kepada wakil untuk menunaikan kewajibannya. Orang atau lembaga yang menerima perwakilan harus amanah dan memiliki kemampuan menjalankannya sesuai ketentuan syar'i. Selain itu, melimpahkan pelaksanaan kewajiban Dam atas Haji Tamattu' atau Qiran dari calon jemaah haji kepada muwakkil dengan membayarkan sejumlah dana untuk pembelian hewan ternak dan disembelih di tanah haram hukumnya sah (Harahap, 2017). Dana Dam juga dapat dimasukkan ke dalam komponen biaya haji yang dikelola oleh penyelenggara perjalanan haji dengan syarat sumbernya dibenarkan secara syar'i dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Dam tersebut bersifat Amanah (yadul amanah) dan apabila jemaah haji yang dalam pelaksanaan ibadahnya tidak terkena kewajiban Dam, maka dana tersebut wajib dikembalikan kepada yang berhak. Mengelola dan menyalurkan daging Dam untuk kepentingan fakir miskin di luar tanah haram Makkah juga diperbolehkan.

Diktum kedua berisi rekomendasi yang menyarankan agar pemerintah mengatur dan menertibkan pembayaran Dam bagi jemaah haji Indonesia sesuai dengan fatwa ini guna menjamin terlaksananya ibadah tersebut secara benar secara syar'i, memberikan kemudahan bagi jemaah dan mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu, pemerintah RI disarankan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi Arabia untuk mengelola Dam yang dibayarkan oleh jemaah haji Indonesia demi kemanfaatan bagi fakir miskin, termasuk di Indonesia (Abidin, 2016). Potensi penggunaan hak diskresi penerbitan regulasi oleh Kementerian Agama dapat berdampak besar pada manfaat aktivitas Dam Haji. Dengan asumsi biaya Rp.3.100.000 per jemaah untuk Dam Haji dan jumlah jemaah yang mencapai 211.000 orang, potensi pemberdayaan ekonomi minimal mencapai Rp. 654.100.000.000 per tahun. Jumlah ini mencerminkan hubungan timbal balik ekonomi dan distribusi daging Dam Haji bagi umat Islam di Indonesia dalam

konteks ekosistem ekonomi haji. Distribusi daging kurban ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan stunting, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan asupan protein hewani yang cukup.



Gambar 1. Skema Akad Wakalah Pembayaran, Pemotongan dan Distribusi Dam Haji (Sumber: Data diolah dari berbagai media dan informasi lainnya)

Gambar skema akad wakalah pembayaran, pemotongan, dan distribusi Dam Haji menunjukkan bahwa dengan regulasi yang tepat, proses ini dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Regulasi yang mengatur tentang pembayaran, pemotongan, dan distribusi Dam Haji akan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan fikih dan memberikan manfaat maksimal bagi jemaah dan masyarakat luas. Dengan intervensi yang tepat, Kementerian Agama dapat memastikan bahwa pelaksanaan Dam Haji tidak hanya memberikan manfaat spiritual bagi jemaah tetapi juga manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia. Penerbitan regulasi yang mengatur pelaksanaan Dam Haji dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan fikih dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Dengan data dan tren yang ada, serta peluang pasar ekspor yang terus berkembang, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi dan ekspor ternak domba dan kambing, yang akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, terutama dengan adanya pasar tetap dari pelaksanaan Dam Haji yang dilakukan setiap tahun.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan data dan informasi yang telah dipaparkan mengenai Dam Haji, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan manfaat dari pelaksanaan Dam Haji bagi jemaah, serta untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan sosial yang terkait. Berikut ini adalah narasi panjang mengenai rekomendasi kebijakan tersebut: *Pertama-tama*, diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi terhadap data terkait pelaksanaan Dam Haji. Data tentang akad, harga, berat, tempat pemotongan, dan distribusi Dam Haji yang saat ini tidak tersedia secara detil perlu dikumpulkan melalui koordinasi langsung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua proses terkait Dam Haji dapat dipantau dan dievaluasi secara tepat, sesuai dengan ketentuan fikih dan peraturan yang berlaku (Renta et al., 2023).

Kedua, dalam hal pengaturan keuangan Dam Haji, disarankan untuk menerbitkan kebijakan yang jelas dan komprehensif melalui regulasi tingkat tinggi seperti Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Regulasi ini akan memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian bagi semua pihak terkait, baik dari sisi jemaah haji maupun penyelenggara haji di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga keadilan ekonomi dalam pelaksanaan Dam Haji, mengingat pentingnya aspek keamanan dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana Dam Haji (Faundra & Christy Damayanti, 2017). *Ketiga*, pentingnya peran Kementerian Agama dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan Dam Haji tidak bisa dilebih-lebihkan. Kementerian Agama perlu mengintensifkan upaya pengawasan dan pendampingan terhadap penyelenggara haji, termasuk dalam hal penyaluran daging dam untuk fakir miskin di luar tanah haram Makkah. Hal ini akan memastikan bahwa dana Dam Haji digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan sosial yang diamanahkan oleh nilai-nilai Islam.

Keempat, rekomendasi penting lainnya adalah untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi dalam mengelola dana Dam Haji. Koordinasi yang baik antara kedua negara ini akan membantu dalam pengelolaan dana Dam Haji secara efisien dan transparan, serta memastikan bahwa manfaat dari Dam Haji dapat dirasakan secara maksimal oleh jemaah haji Indonesia. *Kelima*, dalam rangka meningkatkan manfaat ekonomi dari Dam Haji, dianjurkan untuk memperluas akses pasar ekspor untuk komoditas ternak, seperti domba dan kambing (Anas et al., 2023). Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi dan ekspor komoditas ini, yang telah terbukti dari ekspor domba ekor tipis ke Malaysia dan domba Garut ke Uni Emirat Arab. Dengan demikian, perlu dukungan pemerintah dalam memfasilitasi peternak untuk memenuhi standar internasional dan meningkatkan daya saing produk ternak Indonesia di pasar global.

Terakhir, dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada jemaah haji, disarankan agar Kementerian Agama secara aktif mengedukasi jemaah haji tentang pentingnya pelaksanaan Dam Haji sesuai dengan ketentuan fikih. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk sosial media dan ceramah-ceramah pra keberangkatan haji, untuk memastikan bahwa jemaah haji memahami dan mendukung pelaksanaan Dam Haji yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan di atas

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan manfaat sosial-ekonomi dari pelaksanaan Dam Haji bagi jemaah haji Indonesia. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan pelaksanaan haji yang terbaik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan tentang Dam Haji, dapat disimpulkan bahwa implementasi program ini tidak hanya penting dalam konteks ibadah haji sesuai dengan ketentuan fikih, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam aspek ekonomi dan sosial. Dam Haji bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan juga merupakan instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan stunting, serta memperkuat ekosistem ekonomi terkait ternak domba dan kambing. Selain itu, pelaksanaan Dam Haji dengan baik juga memberikan peluang untuk mengoptimalkan pengelolaan dana dan distribusi daging, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan, baik di dalam maupun di luar tanah haram Makkah.

Rekomendasi kebijakan yang telah dijabarkan, seperti peningkatan transparansi data, penerbitan regulasi yang jelas, koordinasi bilateral dengan Arab Saudi, serta edukasi intensif kepada jemaah haji, menjadi langkah krusial untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan Dam Haji di masa mendatang. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memenuhi aspek ibadah haji secara spiritual, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan umat Islam secara ekonomi dan sosial melalui implementasi Dam Haji yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Referensi

- Abidin, M. Z. (2016). Analisis Investasi Dana Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Harmoni*, 15(2), Article 2.
- Amanuddin, M. (2022). Pengaruh Dana Talangan Haji Dan Umrah Terhadap Ekonomi Dan Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(9), Article 9. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i9.479>
- Anas, K., Nurhayati, W., & Aslichah. (2023). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Dampaknya Terhadap Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2023. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.50>
- Andni, R., Widodo, S. F. A., & Afendi, A. H. (2023). Investment Multiplier Effect of Hajj Funds on Economic Growth in Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/islamica.2023.17.2.313-334>
- Faatin, S. (2019). Haji Dua Kali: Kajian terhadap Motif Pengulangan Haji Masyarakat Muslim di Kudus. *FIKRAH*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v7i1.4296>

- Fahham, A. M. (2016). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya. *Kajian*, 20(3), Article 3. <https://doi.org/10.22212/kajian.v20i3.625>
- Faundra, A., & Christy Damayanti, H. H. (2017). Diplomasi Pemerintah Indonesia Kepada Arab Saudi Tentang Penambahan Kuota Haji Indonesia. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), Article 1.
- Harahap, H. U. (2017). Peran Penyelesaian Dam Terhadap Status Hukum Pelaksanaan Haji. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), Article 2. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/9>
- Hulwati, H., Mujiono, S., Andespa, R., & Fadhlan, A. (2023). Unveiling the Benefits of Hajj Funds Investment in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/share.v12i1.16082>
- Maesya, A., & Rusdiana, S. (2018). Prospek Pengembangan Usaha Ternak Kambing dan Memacu Peningkatan Ekonomi Peternak. *Agriekonomika*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i2.4459>
- Mahfudzi, M. (2018). Peran Islam Terhadap Praktek Ekonomi Dalam Dam Haji. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 17(1), 129–141. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8098>
- Musorif, M. (2022). Hukum Penggunaan Dana Haji sebagai Sumber Pendanaan Nasional. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 1393–1410. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6781>
- Nurchaliza, V. (2018). Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim di Indonesia Melalui Wakaf Produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.31>
- Panambang, F. S., Baid, N., Papatungan, N., & Latif, A. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Di Sulawesi Utara. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i1.941>
- Renta, P. P., Endah Trisnani, Hadidah Sallimi, & Surwandono, S. (2023). Efektivitas Diplomasi Haji oleh Kementerian Agama Indonesia pada Tahun 2020-2023. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 13(1), 1–25. <https://doi.org/10.15642/jrp.2023.13.1.1-25>
- Safitri, L., Muatip, K., & Cahyo, D. N. (2023). Profil Shahibul Qurban Dan Preferensi Pemilihan Hewan Kurban Di Kabupaten Banjarnegara. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Agribisnis Peternakan (STAP)*, 10, 532–538.
- Salim, N. (2016). Pengentasan Kemiskinan sebagai Tanda Kemabruran Haji. *Jurnal Cendikia*, 8(02), Article 02. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v8i02.40>
- Sholichah, I. U. (2020). Hukum Investasi Produktif Pengelolaan Dana Haji Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(3), Article 3.
- Syam, R. S. E., & Basir, A. (2022). Pemberdayaan Daging Hewan Dam dalam Ibadah Haji menurut Fatwa MUI dan Upaya Pengentasan Fakir Miskin di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama*, 1(1), Article 1.
- Tanjung, H. (2019). Hikmah Ibadah Haji Terhadap Ekonomi. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.32507/ajei.v1i1.390>

- Tuhfah Nabelah, N. (2021). Tanggung Jawab BPKH Terhadap Dana Haji yang Diinvestasikan Berdasarkan Akad Mudharabah Muqayyadah. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3883>
- Wardana, M. N. E., & Suhartini, D. (2023). Analisis Aspek Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Melalui Aplikasi SSKOHAT. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2580>
- Wulandari, S., Azizi, S. D. N., & Hidayat, R. T. (2023). Paradigma Ibadah Haji dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2137>
- Yuliani, M. (2022). Analisis Maqashid Syariah Dalam Setoran Awal Dana Haji Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.573>